

HEDGING STRATEGY TIONGKOK DALAM PENERAPAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN

(Skripsi)

Oleh

NAURA AISHA KLAEDA AUGUSTTUBELA

NPM 2016071039



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

***HEDGING STRATEGY* TIONGKOK DALAM PENERAPAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN**

Oleh

NAURA AISHA KLAEDA AUGUSTTUBELA

Sengketa kawasan Laut Tiongkok Selatan yang terjadi dalam beberapa dekade lalu melibatkan negara-negara di sekitarnya. Tiongkok berperan sebagai aktor utama dalam sengketa tersebut disebabkan oleh adanya klaim teritorial *Nine-dash line* oleh Tiongkok bahwa hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah milik Tiongkok. Klaim teritorial ini diiringi dengan eskalasi asertivitas maritim Tiongkok di kawasan tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, Tiongkok menginisiasikan kebijakan lintas batas yang disebut sebagai BRI yang di dalamnya menekankan pada kerja sama dan konektivitas. Adanya dua kebijakan yang bertentangan tersebut menjadi langkah Tiongkok dalam memenuhi kepentingannya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan BRI serta untuk menganalisis kontradiksi yang muncul dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatif. Penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui buku, surat kabar, jurnal ilmiah, dan sejumlah laman di internet antara lain RAND, CSIS, dan IISS. Teori dan konsep yang digunakan ialah teori kebijakan luar negeri dan konsep *hedging strategy* dan asertivitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontradiksi kebijakan BRI merupakan dampak penerapan yang penulis pandang sebagai *hedging strategy* pada dua kebijakan yang diterapkan di kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan Tiongkok yang diupayakan melalui kebijakan luar negerinya. Selain itu, hasil penelitian juga melihat bahwa kemungkinan konflik akan berekskalasi manakala Tiongkok mempertahankan penggunaan *hedging strategy*.

Kata Kunci: Strategi Hedging, Tiongkok, BRI, Laut Tiongkok Selatan, Kebijakan Luar Negeri

ABSTRACT

HEDGING STRATEGY TIONGKOK DALAM PENERAPAN BELT AND ROAD INITIATIVE DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN

By

NAURA AISHA KLAEDA AUGUSTTUBELA

The South China Sea dispute occurred in the past few decades involved the surrounding countries. China played a major role in the dispute due to China's Nine-dash line territorial claim that almost the entire South China Sea belongs to China. This territorial claim is accompanied by an escalation of China's maritime assertiveness in the region. However, at the same time, China initiated a cross-border policy called the BRI which emphasizes cooperation and connectivity. The existence of these two conflicting policies is China's step in fulfilling its interests in the South China Sea region. This study aims to describe the implementation of the BRI policy and to analyze the contradictions that arise from the policy. This study uses a qualitative approach with explanatory analysis. The author collected secondary data through books, newspapers, scientific journals, and a number of internet pages from RAND, CSIS, and IISS. The theories and concepts used are foreign policy theory and the concept of hedging strategy and assertiveness. The results of this study indicate that the contradiction of the BRI policy is the impact of the implementation of what the author views as a hedging strategy on two policies implemented in the South China Sea region to fulfill China's interests pursued through its foreign policy. In addition, this study also sees that the possibility of conflict that may escalate when China maintains the use of a hedging strategy.

Keywords: Hedging Strategy, China, BRI, South China Sea, Foreign Policy

***HEDGING STRATEGY TIONGKOK DALAM PENERAPAN BELT AND
ROAD INITIATIVE DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN***

Oleh

Naura Aisha Klaeda Augusttubela

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Hedging Strategy Tiongkok dalam Penerapan Belt and Road Initiative di Kawasan Laut Tiongkok Selatan**
Nama Mahasiswa : **Naura Aisha Klaeda Augustubela**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2016071039**
Jurusan : **Hubungan Internasional**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

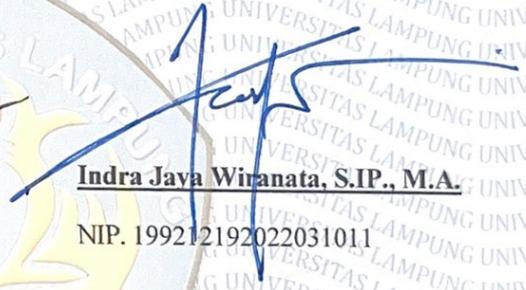
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.

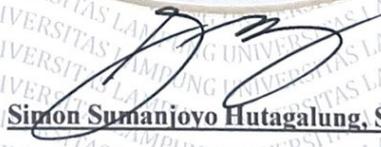
NIP. 198604282015041004



Indra Java Wiranata, S.I.P., M.A.

NIP. 199212192022031011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

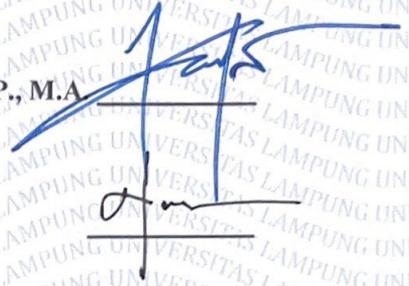
Ketua

: Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A.



Sekretaris

: Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Hasbi Sidik, S.I.P., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 13 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



Naura Aisha Klaeda Augustubela
NPM 2016071039

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada 17 Agustus 2002 dari pasangan Bapak Ikhlas dan Ibu Elda Marlita. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dengan adik perempuan dan adik laki-laki. Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Ar-Raudah, Bandar Lampung. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SD Ar-Raudah Bandar Lampung, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik seperti mengikuti lomba diskusi ilmiah tingkat nasional pada Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia ke-34 dan *Human Rights Paper Session* pada *the 12th World Human Rights Cities Forum*. Selain itu, penulis juga aktif dalam beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti *English Society* (ESo) khususnya pada divisi *debating* dengan mengikuti beragam perlombaan skala nasional dan internasional. Penulis berhasil menjuarai perlombaan seperti SEF *English Talent Competition* (SECTION) 2022 dan Lomba Debat EXPO Himafis Universitas Sriwijaya 2022. Penulis pun berkesempatan menjadi perwakilan LLDIKTI II sebagai tim terbaik ke-4, tim terbaik ke-13 Tingkat Wilayah 1 dan menjadi delegasi Universitas Lampung dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 2024. Penulis juga aktif sebagai Bendahara Umum I Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Pada tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).

MOTTO

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

“Put your trust in Allah: Allah is enough to trust.”

(Q.S. Al-Ahzab 33:3)

I could build a castle out of all the bricks they threw at me

(Taylor Swift)

You must always have faith in people.

And, most importantly, you must always have faith in yourself.

(Elle Woods)

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah, Bunda, dan adik-adikku tersayang
Serta seluruh Pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat anugerah, rahmat, dan juga ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hedging Strategy Tiongkok dalam Penerapan Belt and Road Initiative di Kawasan Laut Tiongkok Selatan “ sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Iwan Sulistyoyo, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang sudah membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini, memberikan arahan dan juga saran yang membangun untuk penelitian ini;
4. Mas Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang juga sudah membimbing dan memberikan arahan serta masukan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini;
5. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan wawasan baru, saran, dan motivasi agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi dan bermanfaat di masa depan;
6. Mba Gita Kharisma, S. IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis semasa perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Ayah, Bunda, Adek Ara, Attar, dan Alesha serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu percaya pada kemampuan penulis dan selalu

memberikan semangat, doa, dan dukungan penuh baik secara moral maupun materiil;

9. Adyatma Disa Soewandana yang selalu mendukung, mendoakan, menghibur, menemani, dan memberikan semangat, apresiasi, dan afirmasi positif. Terima kasih telah membersamai penulis dalam kondisi apapun, mulai dari masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. VVibu OT8, Risa, Assyabilla, Madelin, Yolanda, Salin, Btari, dan Audi yang telah menjadi sahabat penulis dari hari pertama perkuliahan. Terima kasih untuk segala cerita dan tawa yang kita bagi bersama dan semoga ke depannya kita selalu berteman baik, ya.
11. BM, Risa, Wafa, Farhan, Imam, dan Owen selaku teman bermain penulis di masa perkuliahan yang tidak pernah kehabisan ide untuk mengunjungi berbagai tempat-tempat baru dan menghabiskan waktu bersama;
12. Sisthreehood, Kanaya dan Ola, yang merupakan sahabat penulis yang selalu sigap dan siap hadir untuk menemani penulis dalam berbagai situasi untuk mendoakan di kala penulis merasa kesulitan dan turut serta merayakan apapun yang telah penulis capai, terima kasih untuk selalu ada;
13. SR103, Kanaya, Hanna, Kila, Febi, Rizki, dan Gilang yang telah mengisi hari-hari penulis sejak kali pertama bertemu di GO sejak SMA dan tidak pernah hentinya memberikan dukungan dan semangat untuk penulis;
14. Debaters ESo, Kak Dika, Kak Ezra, Kak Gab, Kak Waston, Assya, Dhoni, Fifi, Aria, Tata, Anta, dan Ikrar. Terima kasih telah mengenalkan penulis dengan dunia penuh argumentasi dan terima kasih atas berbagai pengalaman, kesempatan, dukungan, dan apresiasi yang selalu diberikan untuk penulis;
15. Bapak dan Ibu staf Divisi P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung), Pak Edy, Pak Fathir, Pak Jon, Pak Amir, Pak Ade, Pak Ayef, Pak Pundawa, Ibu Mardiana, Ibu Maryani, Ibu Meli, dan Ibu Lita. Terima kasih atas semangat, dukungan, saran, dan doa baik yang selalu diberikan kepada penulis mulai dari hari pertama penulis menjalankan kegiatan magang hingga masa penyusunan skripsi ini;

16. Seluruh teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2020 yang saling membantu satu sama lain selama masa perkuliahan;
17. Serta seluruh pihak yang mendoakan dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025

Naura Aisha Klaeda Augusttubela

NPM. 2016071039

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Analitis.....	15
2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri.....	15
2.2.2. Konsep Hedging Strategy.....	19
2.2.3. Assertiveness.....	21
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Fokus Penelitian.....	26
3.3. Sumber Data.....	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5. Teknik Analisis Data.....	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Belt and Road Initiative (BRI).....	31
4.1.1. Silk Road Economic Belt.....	36
4.1.2. Maritime Silk Road.....	37
4.2. Kontradiksi Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Kawasan Laut Tiongkok Selatan: kepentingan nasional, aspek kompetitif, aspek kooperatif.....	38
4.2.1. Faktor Material atau Fisik.....	53
4.2.2. Faktor Kapabilitas.....	61
4.2.3. Faktor Struktural.....	64
4.3. Tiongkok terhadap Negara-Negara di Sekitar Kawasan Laut Tiongkok Selatan: Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.....	71
4.3.1. Filipina.....	71
4.3.2. Vietnam.....	73
4.3.3. Malaysia.....	74
4.3.4. Brunei Darussalam.....	76
V. KESIMPULAN & SARAN	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	62
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hasil VosViewer	111
Gambar 2. 2 Skema Atribut Nasional	18
Gambar 2. 3 Perbedaan antara perilaku pasif, asertif, dan agresif.....	21
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Sumber: diolah oleh Penulis.....	24
Gambar 4. 1 Peta Jalur Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI)	33
Gambar 4. 2 Grafik PDB Tiongkok 1990-2015.....	34
Gambar 4. 3 Peta Enam Koridor Ekonomi Silk Road Economic Belt.....	36
Gambar 4. 4 Batas Geografis Tiongkok.....	40
Gambar 4. 5 Peta Eleven-dash Line Tiongkok 1947	43
Gambar 4. 6 Peta Nine-dash Line Tiongkok.....	44
Gambar 4. 7 Topografi Tiongkok Melalui 3D Render.....	56

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: the Association of Southeast Asian Nations
BRI	: Belt and Road Initiative
CCCC	: China Communications Construction Company
CCP	: Chinese Communist Party
CNOOC	: China National Offshore Oil Corporation
CSSC	: China State Shipbuilding Corporation
ECRL	: East Coast Rail Link
GDP	: Gross Domestic Product
LNG	: Liquid Natural Gas
MSR	: Maritime Silk Road
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCA	: Permanent Court of Arbitration
PDB	: Produk Domestik Bruto
PLA	: People's Liberation Army
SOEs	: State-Owned Enterprises
TSGP	: Trans-Sabah Gas Pipeline
UNCLOS	: the United Nations Convention on the Law of the Sea
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini akan mendeskripsikan strategi *hedging* Tiongkok yang diterapkan dalam kebijakan luar negerinya yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini perlu dan pantas untuk dilakukan dengan berdasar pada justifikasi empiris yang disertai dengan kebaruan yang ditemukan oleh penulis. Dengan demikian, dalam latar belakang penelitian ini, penulis memaparkan kebijakan luar negeri Tiongkok yakni *Belt and Road Initiative* (BRI) dan keasertivitasan tindakan Tiongkok khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang memegang peranan dalam kesuksesan tercapainya kebijakan BRI tersebut. Kemudian dilanjutkan pada justifikasi empiris yang dikaitkan dengan teori kebijakan luar negeri, konsep *hedging strategy*, dan konsep asertivitas. Dalam bab ini, penulis turut memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Tiongkok sebagai entitas negara yang juga memiliki kepentingan nasionalnya sendiri turut mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu kebijakan luar negerinya yang disebut sebagai kebijakan *Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road* atau (BRI) *Belt and Road Initiative* secara singkat. Tujuan dari kebijakan BRI ialah mempromosikan konektivitas dan kerja sama antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang dimaksudkan untuk menghubungkan dan mengembangkan sektor perekonomian Eurasia melalui investasi, perdagangan, dan infrastruktur. Kebijakan ini dicanangkan pertama kali pada tahun 2013 oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam pidatonya ketika ia

menghadiri dua acara yang berbeda (Shang, 2019). Pertama, saat ia mengunjungi Universitas Nazarbayev di Kazakhstan dengan menyebutkan akan membangun Jalan Sutra Sabuk Ekonomi atau *Silk Road Economic Belt* melalui promosi koordinasi kebijakan, penghubungan jalan, serta penguatan ikatan secara *people-to-people* (The State Council The People's Republic of China, 2016). Kedua, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk bekerja sama dengan organisasi regional Asia Tenggara, ASEAN (*the Association of South East Asian Nations*) dalam membangun *21st Century Maritime Silk Road* yang dianggap mampu menjadi jembatan untuk memperkuat konektivitas dan mempromosikan kerja sama maritim (Shang, 2019).

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Presiden Xi Jinping dalam pidato-pidatonya, kebijakan (BRI) *Belt and Road Initiative* terdiri atas dua aspek utama, yakni *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. Fokus utama dari *the Silk Road Economic Belt* ialah menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Rusia, negara-negara Baltik, Tiongkok dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Asia Barat, dan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia (Shang, 2019) (Smith, 2018). Sedangkan, *the 21st Century Maritime Silk Road* dirancang atas dua rute. Pertama, dari Pesisir Tiongkok menuju Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia. Kedua, dari Pesisir Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan ke Kawasan Pasifik Selatan (Smith, 2018). Dengan demikian, BRI merupakan mega proyek mengingat cakupan kawasannya yang luas melintasi tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika (Anam & Ristiyani, 2018,). Sehingga, dalam penerapannya diperlukan koordinasi namun tidak terbatas pada peningkatan kesepahaman dan kepercayaan politik, perluasan kepentingan bersama, serta kerja sama regional.

Kerja sama regional yang dibutuhkan demi kelancaran berjalannya BRI turut pula dibutuhkan oleh salah satu komponennya, *the 21st Century Maritime Silk Road* (MSR). Kerja sama yang dimaksud termasuk atas pengembangan perdagangan maritim, ekonomi dan perhubungan, pembangunan pelabuhan, serta pemeliharaan jalur laut yang aman dan lancar (Office of the Leading Group BRI, 2017). Dalam memprioritaskan MSR, kerja sama maritim diperlukan untuk menunjang perekonomian akan berfokus pada keterhubungan Tiongkok dengan

negara-negara di Asia bahkan benua lain. Kerja sama ekonomi untuk menunjang konektivitas Tiongkok melalui jalur maritim yang kebanyakan melalui Laut Tiongkok Selatan.

Namun, Laut Tiongkok Selatan telah menjadi “panggung” persengketaan yang melibatkan beberapa negara di sekitarnya seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Tiongkok (Teixeira, 2021). Persengketaan kawasan ini dilatarbelakangi oleh klaim tumpang tindih atas kepemilikan kawasan oleh negara-negara terlibat. Laut Tiongkok Selatan dikenal sebagai salah satu kawasan penting yang menjadi jalur singgah perdagangan via perairan. Selain itu, kawasan ini memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan seperti cadangan minyak dan gas alam yang terletak di dasar lautannya. Dengan demikian, kawasan Laut Tiongkok Selatan diperebutkan kepemilikannya.

Meskipun Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) sudah terbentuk pada tahun 1982 silam, konvensi ini terbukti belum mampu menyelesaikan permasalahan terkait persengketaan kawasan ini yang dapat dilihat melalui dinamika persengketaan di kawasan Laut Tiongkok Selatan. UNCLOS ditujukan untuk meregulasi segala urusan terkait perairan termasuk aturan mengenai batasannya, hak dan kewajiban setiap negara dalam perairannya, dan lain sebagainya. Perbedaan interpretasi tiap negara atas Konvensi Hukum Laut Internasional ini yang menyebabkan persengketaan Laut Tiongkok Selatan semakin memanas (Joshi, Prashant dkk., 2021) Dengan beragamnya interpretasi atas pasal dan ayat dari Konvensi Hukum Laut Internasional mengakibatkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini menjatuhkan klaim-klaim khususnya terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel yang terletak di titik tengah strategis kawasan Laut Tiongkok Selatan (Poling, 2019). Klaim atas kawasan ini dilandaskan pada kepentingan nasional tiap-tiap negara terlibat, termasuk Tiongkok (Kaplan, 2020) .

Tiongkok mengajukan klaim kepemilikan kawasan ini dengan akumulasi sebesar 90 persen dari total keseluruhan luas Laut Tiongkok Selatan berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus atau yang disebut sebagai *Nine-Dash Line* . Pernyataan terkait *Nine-Dash Line* pertama kali diajukan oleh Tiongkok pada tahun 1949

dengan berlandaskan pada klaim sejarah atau “*Special Historic Rights*”. Meskipun pemerintah Tiongkok tidak pernah memberikan bukti relevan untuk kepemilikan teritori Laut Tiongkok Selatan, tokoh Tiongkok beranggapan adanya empat dasar klaim “*Special Historic Rights*” seperti catatan penangkapan ikan, catatan ekspedisi militer sporadis khususnya pada masa Dinasti Cheng Ho dan Dinasti Ming, catatan penamaan, serta catatan tentang batas administrasi (Korkut & Kang, 2017). Klaim ini dimulai dari wilayah Selatan Tiongkok yang mencakup teritori negara lain yang terletak di dekat kawasan Laut Tiongkok Selatan antara lain negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Taiwan.

Klaim Tiongkok atas kawasan Laut Tiongkok Selatan pun menjadi permasalahan serius yang akhirnya dibawa oleh Filipina sebagai negara terlibat pada tahun 2013 ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA) untuk diupayakan penyelesaiannya untuk pertama kali (Korkut & Kang, 2017). Akan tetapi, Tiongkok menolak untuk terlibat dalam persidangan dengan menerbitkan Kertas Posisi atau *position paper* yang berintikan bahwa Mahkamah Arbitrase Internasional tidak memiliki wewenang untuk menangani permasalahan terkait kedaulatan tersebut karena Tiongkok menganggap permasalahan tersebut berada di luar kendali UNCLOS. Hingga pada tahun 2016, putusan akhir dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa mahkamah menolak klaim sejarah Tiongkok dan klaim lainnya seperti *nine-dash line* dengan menyebutkan klaimnya tidak berdasarkan hukum (Korkut & Kang, 2017) (Permanent Court of Arbitration, 2016). Namun, Tiongkok menolak hasil putusan tersebut dan tetap berusaha keras untuk mempertahankan klaimnya atas kawasan Laut Tiongkok Selatan yang bahkan tertera dalam *Chinese Defence White Paper* tahun 2019 dengan menyebutkan bahwa Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dipisahkan dari teritori Tiongkok (Asia Maritime Transparency Initiative, 2018). Pembangunan pulau buatan oleh Tiongkok ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas untuk mengontrol dan mendominasi kawasan Laut Tiongkok Selatan. Untuk memenangkan “perlombaan” antara negara terlibat di kawasan ini juga, dapat dilakukan dengan intimidasi dan investasi yang salah satunya melalui reklamasi pulau (AlMannai, 2019).

Aturan mengenai *artificial islands* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tertera dalam UNCLOS Pasal 60 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara berpantai memiliki hak eksklusif untuk membangun pulau buatan atau reklamasi dengan catatan tidak memengaruhi batasan laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif dengan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 60 Ayat (7):

“Artificial islands, installations and structures, and the safety zones around them may not be established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international navigation”

Meskipun Tiongkok berdalih bahwa reklamasi dilakukan untuk kebutuhan navigasi, pulau buatan tersebut nyatanya digunakan sebagai pangkalan militer Tiongkok (Center for Strategic and International Studies, 2024). Terlebih lagi, Tiongkok menggunakan pulau-pulau tersebut untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Sejak tahun 2015, pulau reklamasi Tiongkok dipasok dengan peralatan militer yang canggih seperti radar, pertahanan udara, serta lapangan terbang (Asia Maritime Transparency Initiative, 2024)

Selain pereklamasian pulau, Tiongkok juga mengambil tindakan tegas terhadap negara lain yang dianggap mengancam “kedaulatan” Tiongkok di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan termasuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa kawasan. Mulai dari patroli militer yang dilakukan oleh tentara Angkatan Laut Tiongkok, *coast guard* atau penjaga laut dan pantai, dan *China Maritime Militia* atau Milisi Maritim China, sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi massa bersenjata (Teixeira, 2021). Patroli militer yang dilaksanakan oleh Tiongkok acapkali bersitegang dan berkonfrontasi dengan tentara dari negara lain, seperti Filipina dan Vietnam. Jauh sebelumnya, pada tahun 1974 dan 1988, terjadi bentrok antara angkatan laut Tiongkok dengan tentara Vietnam yang menewaskan tentara hanya dari salah satu pihak, yakni tentara Vietnam (Hanifudin dkk., 2023).

Tiongkok juga melakukan berbagai ancaman militer dengan tujuan menghambat atau menghalangi negara lain dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah yurisdiksinya yang sesuai dengan aturan UNCLOS. Pada Juli 2017, Tiongkok mengultimatum Vietnam dengan aksi militer agar berhenti

melakukan *drilling* atau pengeboran minyak bumi yang padahal masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam (Kuok, 2019). Pada tahun 2018, Tiongkok memberikan peringatan serupa ketika Vietnam berniat untuk mengebor minyak dan gas bumi di ZEEnya (Kuok, 2019). Ancaman militer oleh Tiongkok disebabkan oleh keyakinan atas kepemilikan kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Selain itu, tindakan ofensif ini juga ditujukan kepada Filipina melalui serangan terhadap perahu nelayan yang berlayar di sekitar Reed Bank, kawasan ZEE Filipina. Tindakan tersebut berkonsekuensi tenggelamnya perahu tersebut pada tahun 2019 tanpa pertanggungjawaban dari Tiongkok (Kuok, 2019). Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir tepatnya pada Juni 2024, adanya konfrontasi antara Filipina dan Tiongkok yang diakibatkan oleh bertabraknya dua kapal dari negara terlibat yang dipicu oleh pengabaian peringatan yang diberikan oleh Tiongkok (Reuters, 2024). Tindakan ofensif oleh Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan telah menyebabkan eskalasi konflik yang mampu berdampak pada penurunan kestabilan keamanan kawasan (Thayer, 2023). Apabila terbukti demikian, akan berkonsekuensi pada kelancaran terlaksananya kebijakan BRI.

Berdasarkan latar belakang, ada urgensi dan ketertarikan dari Penulis untuk melakukan penelitian atas isu tersebut. Pertama, Tiongkok telah menyebutkan bahwa Laut Tiongkok Selatan berperan penting dalam memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya yang diagendakan dalam kebijakan luar negeri “*Silk Road Economic Belt*” dan khususnya “*the 21st Century Maritime Silk Road*” yang akan terwujud melalui penguatan kerja sama maritim yang perlu dilakukan mengingat dua dari tiga rute MSR akan melewati kawasan Laut Tiongkok Selatan (Barman, 2023). Kedua, meskipun Tiongkok menyadari kerja sama maritim dengan negara di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan memegang peranan besar atas kesuksesan kebijakan *Maritime Silk Road*, Tiongkok tetap melakukan tindakan yang dianggap ofensif terhadap negara lain yang menjatuhkan klaim kepemilikan atas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus dalam membahas mengenai alasan mengapa Tiongkok melakukan tindakan ofensif yang berkontradiksi dengan kepentingan nasionalnya yang justru akan menghambat terwujudnya kepentingan nasional Tiongkok, *Belt and Road Initiative* (BRI) khususnya *Maritime Silk Road* (MSR).

1.2. Rumusan Masalah

Sejak diumumkannya kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh Tiongkok pada tahun 2013 dengan Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu kawasan yang mampu menunjang tercapainya komponen kebijakan tersebut, yakni *Maritime Silk Road* (MSR), Tiongkok berupaya untuk melakukan kerja sama khususnya di bidang maritim. Namun, Tiongkok melakukan tindakan asertif sebagai cara yang diklaim untuk melindungi kedaulatan negaranya dari negara lain di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kontrasnya, Tiongkok hanya memberlakukan asertivitas militernya di kawasan tersebut. Tindakan asertif Tiongkok tersebut justru dinilai ofensif dan mampu mengancam kestabilan dan keamanan kawasan.

Goran Ilik dan Vesna Shapkoski dalam karya mereka telah menganalisis adanya dualisme kebijakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, di mana terdapat kontradiksi antara upaya kerja sama melalui BRI dengan kebijakan asertivitas militer yang diterapkan di kawasan tersebut. Sementara itu, literatur yang ditulis oleh Kuik Cheng-Chwee turut menjelaskan mengenai adanya kontradiksi dalam kebijakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Kuik menjelaskan bahwa kontradiksi tervisualisasi melalui BRI dan asertivitas di Laut Tiongkok Selatan. BRI merepresentasikan upaya ekonomi dan diplomatik Tiongkok untuk mempromosikan kerja sama regional dengan pendekatan yang lebih bersifat damai.

Sebaliknya, asertivitas Tiongkok dengan klaim teritorial dan kehadiran militernya mencerminkan sikap yang lebih keras. Pendekatan ganda ini menggambarkan ketegangan antara kebutuhan Tiongkok akan stabilitas regional untuk mendukung pertumbuhan ekonominya melalui BRI dan keinginannya untuk menegaskan klaim teritorialnya. Hal ini memunculkan *gap* penelitian, Tiongkok yang memerlukan kesinergisan dengan negara lain khususnya di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk kerja sama maritim demi menunjang tercapainya kebijakan BRI tetapi justru bertindak asertif ofensif terhadap negara-negara yang dapat membantu terjalannya kerja sama maritim tersebut. Berdasarkan penjelasan

yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti dengan fokus pada rumusan masalah yaitu: "Bagaimana Tiongkok menyelesaikan kontradiksi mengenai kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) di Laut Tiongkok Selatan?"

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Maritime Silk Road* (MSR) di Laut Tiongkok Selatan; dan
2. Menjelaskan *hedging strategy* Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang mampu memberikan pemahaman mengenai penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Maritime Silk Road* (MSR) di Laut Tiongkok Selatan. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kontradiksi kebijakan di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dengan memahami kompleksitas ini secara lebih mendalam, para pembaca akan memperoleh pengetahuan tambahan terkait kebijakan-kebijakan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan kajian dalam Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian kebijakan luar negeri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

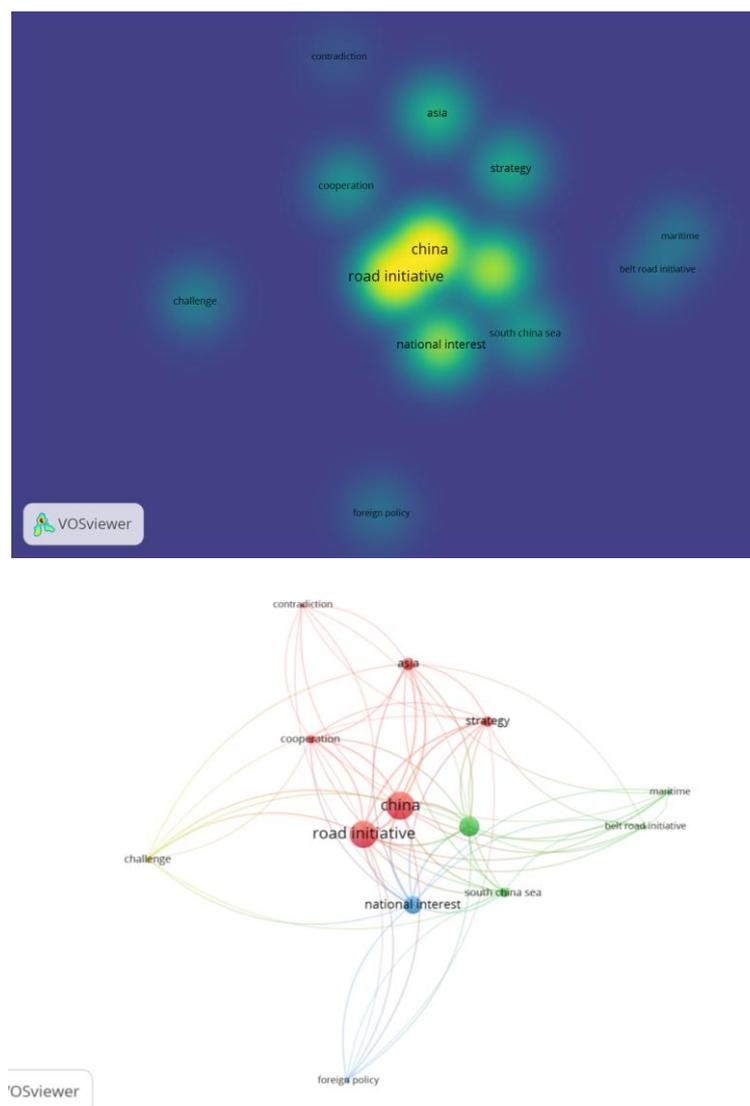
Dalam bab ini, penulis menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi penulis dalam memilih konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagian kedua merupakan penjelasan terkait landasan konseptual yang memuat konsep yang akan membantu penulis dalam menganalisis yakni teori Kebijakan Luar Negeri dan konsep *Hedging Strategy* dan konsep asertivitas. Bagian terakhir akan memuat kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menciptakan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah serangkaian studi yang dijadikan acuan utama untuk memahami informasi, wawasan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa studi terdahulu sebagai bahan rujukan yang berguna untuk menunjang analisis penulis dalam menentukan unsur kebaharuan, termasuk konsep atau teori yang akan digunakan untuk meneliti isu ini. Secara khusus, penelitian yang berfokus pada kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan belum banyak dijadikan sebagai fokus pembahasan untuk dieksplorasi. Namun, terdapat sejumlah penelitian terkait dengan topik ini yang telah dilakukan oleh para akademisi lain.

Dalam mendapatkan unsur kebaharuan, penulis menggunakan dua jenis aplikasi yang mampu menunjang penyusunan penelitian ini yakni Publish or Perish yang digunakan untuk menghimpun metadata dan VosViewer sebagai alat pengolah metadata yang telah dihimpun dengan cara menggunakan kata kunci spesifik disesuaikan dengan topik yang ingin dianalisis. Penulis menggunakan beberapa kata kunci: *China, South China Sea, Belt and Road Initiative, Maritime Silk Road,*

dan *National Interest*. Melalui sejumlah kata kunci tersebut, penulis memperoleh 500 karya akademik baik artikel jurnal, buku, maupun laporan yang membahas mengenai kebijakan *Belt and Road Initiative*, *Maritime Silk Road*, dan sengketa kawasan Laut Tiongkok Selatan. Melalui pengolahan metadata tersebut, penulis menemukan minimnya penelitian yang berfokus pada kontradiksi kebijakan yang ditempuh oleh Tiongkok. Sehingga, penulis merasa bahwa topik tersebut perlu mendapatkan pembahasan lebih mendalam mengenai kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* dengan lokus di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Berikut hasil dari pengolahan data VosViewer:



Gambar 2. 1 Hasil VosViewer

Sumber: Diolah oleh Penulis untuk kepentingan penelitian

Penelitian pertama ialah tulisan penelitian oleh Indriana Kartini (2015). Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kebijakan Jalur Sutra Baru yang diusulkan oleh Tiongkok yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Data dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) serta implikasinya terhadap kekuasaan Amerika Serikat. Kartini menggunakan konsep geopolitik dan geoekonomi, kebijakan luar negeri, dan *hegemonic stability theory* untuk mengkaji kebijakan BRI. Kartini menyatakan bahwa ada dua implikasi kebijakan BRI, yaitu sebagai peluang dan sebagai ancaman. Kartini menemukan beberapa penemuan yaitu faktor yang mendorong Tiongkok untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pertama, faktor internal Tiongkok seperti kebutuhan terkait keamanan energi domestik Tiongkok dan jaminan pembangunan ekonomi. Kedua, faktor eksternal berupa kebijakan “*Pivot to Asia*” strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Penelitian kedua ialah tulisan penelitian oleh Kuik Cheng-Chwee (2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dorongan struktural dan kepentingan domestik Tiongkok di balik kebijakan Laut Tiongkok Selatan yang terlaksanakan secara lebih tegas khususnya dalam bidang maritim. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan konsep Legitimasi Politik Domestik yang melibatkan elite pemerintah untuk menjustifikasi otoritas mereka berdasarkan legitimasi kinerja dan legitimasi nasionalis. Kuik menemukan bahwa kontradiksi dari kebijakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan merupakan manifestasi dari gabungan antara dorongan struktural dan kepentingan domestiknya. Kontradiksi yang dimaksud ialah kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan ketegasan maritimnya di Laut Tiongkok Selatan. BRI yang dicanangkan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dan konektivitas ekonomi, termasuk bidang maritim. Namun, tindakan tegas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dianggap berisiko mengganggu stabilitas di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini mampu memberikan analisis bahwa adanya faktor yang melatarbelakangi tindakan kontradiksi Tiongkok terkait kebijakan-kebijakannya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian ketiga ialah tulisan penelitian oleh ChenChen Chen dan Le Yao (2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, laporan resmi, reportase berita terkait topik yang dibahas, dan sumber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi dari *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam gambaran umum kebijakan luar negeri Tiongkok. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Kepentingan Nasional yang berdampak pada kebijakan luar negeri Tiongkok khususnya terkait Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini membahas mengenai promosi kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) serta *Maritime Silk Road* (MSR) oleh Tiongkok sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Untuk memastikan berjalannya BRI dan MSR, Tiongkok menyesuaikan kebijakan luar negerinya di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan dan melakukan konsolidasi rasa saling percaya dengan negara yang terlibat sengketa di kawasan tersebut. Penelitian ini menganggap bahwa MSR mampu menjadi peluang untuk menyelesaikan permasalahan maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian keempat ialah tulisan penelitian oleh Faesal AlMannai (2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis faktor yang mendorong Tiongkok dalam melakukan pembangunan pulau atau reklamasi di kawasan laut Tiongkok Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan alasan yang memungkinkan bagi Tiongkok seperti peluang keuntungan dalam segi ekonomi dan militer. Reklamasi pulau oleh Tiongkok ini memicu reaksi dari negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Menurut UNCLOS, dengan reklamasi Tiongkok akan mampu mengakuisisi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut. Dengan demikian, AlMannai menyimpulkan bahwa reklamasi akan mampu memengaruhi dinamika ZEE yang artinya Tiongkok akan mampu mengklaim lebih banyak daerah di perairan laut.

Penelitian kelima ialah tulisan penelitian oleh Goral Ilik dan Vesna Shapkoski (2022). Dengan menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri, penulis memberikan analisis mengenai ambisi Tiongkok yang terindikasikan melalui kebijakan yang dicanangkannya baik terkait *Belt and Road Initiative* (BRI) maupun sengketa kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dalam perkembangannya sejak

diumumkan, pembangunan BRI bukan hanya mengenai infrastruktur terkait konektivitas namun juga membentuk politik dan pengaruh diplomatik yang memengaruhi posisi kekuasaan tatanan dunia melalui tindakan asertif Tiongkok seperti pembangunan infrastruktur militer dan reklamasi pulau di kawasan yang disengketakan. Tindakan tersebut tetap dilakukan meskipun sudah adanya penolakan atas klaim Tiongkok “*Nine Dash Line*” oleh Mahkamah Arbitrase Internasional. Ilik dan Shapkoski menggagas bahwasanya meskipun ketegasan tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan akan membantu proses perkembangan BRI, namun tindakan tersebut mampu pula bertransformasi menjadi ancaman dalam implementasinya. BRI justru tervisualisasikan sebagai *hard power* yang bertolak belakang dengan prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok: Untuk menciptakan lingkungan eksternal yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok.

2.2. Landasan Analitis

Landasan analitis memuat teori dan konsep yang penting dalam menjalankan dan menyusun sebuah penelitian guna merancang kerangka pemikiran dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat konsep utama yang menjadi fokus, yaitu teori kebijakan luar negeri yang digunakan dalam landasan analisis oleh penulis untuk mengembangkan kerangka analisis penelitian. Penelitian ini berfokus pada adanya indikasi kontradiksi kebijakan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan terkait dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kontradiksi kebijakan ini yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Tiongkok. Oleh karena itu, teori dan konsep yang dipilih oleh Penulis mampu menjelaskan bagaimana proses pemutusan tindakan suatu negara dalam bentuk kebijakan luar negeri dan bagaimana proses tersebut menghasilkan suatu kontradiksi atas kebijakan-kebijakan Tiongkok.

2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu konsep yang mencakup serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk beberapa kepentingan seperti untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional, meningkatkan keamanan, mempromosikan perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Kebijakan luar negeri terdiri atas berbagai aspek, termasuk diplomasi, perdagangan, keamanan, dan budaya.

Menurut Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin, kebijakan luar negeri ditegaskan sebagai tindakan dari otoritas politik yang independen yang hanya dimiliki oleh negara-negara berdaulat. Kebijakan luar negeri juga dirujuk kepada tindakan atau peraturan yang mengatur suatu tindakan karena kebijakan memiliki makna yang bervariasi atau polisemi. Kebijakan luar negeri berfokus pada interaksi antara aktor-aktor dengan lingkungan mereka yang mana membahas mengenai konteks internasional. Kebijakan luar negeri bersifat fluktuatif yang artinya apa

yang dianggap sebagai kebijakan luar negeri hari ini belum tentu akan dianggap demikian di hari kemarin ataupun di keesokan hari (Morin & Paquin, 2018).

Kebijakan luar negeri dari suatu negara pula didasarkan pada tiap-tiap negara. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwasanya politik internasional didasarkan pada perjuangan untuk meraih *power* atau kekuasaan. Artinya, negara bertindak untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan mereka dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur interaksi antar negara. Morgenthau menekankan bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional yang didefinisikan dalam istilah kekuasaan. Kepentingan nasional ini adalah panduan utama bagi pembuat kebijakan dalam menentukan tindakan di arena internasional. Meskipun demikian, dalam realitanya negara perlu mengkonsiderasikan kekuasaan dan kepentingan nasionalnya dalam pengambilan keputusan (Morgenthau, 2006).

Dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri dari suatu negara, Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day mendeskripsikan adanya level analisis dalam menjelaskan mengenai faktor pembentuk kebijakan luar negeri. Faktor psikologis politik, dinamika kelompok, dan konteks sosial budaya dikelompokkan menjadi pendekatan mikro (Hudson & Day, 2020). Contohnya ialah persepsi pribadi pemimpin, bias kognitif, tekanan kelompok, dan narasi dominan yang beredar dalam masyarakat mampu secara signifikan memengaruhi arah dan substansi kebijakan luar negeri suatu negara.

Namun, faktor psikologis politik dapat digunakan untuk menganalisis terbentuknya suatu kebijakan luar negeri hanya dalam tujuh kondisi. Pertama, bagaimana pemimpin dalam memimpin suatu rezim. Kedua, ketika Sang Pemimpin tertarik dalam kebijakan luar negeri. Ketiga, saat krisis. Keempat, ketika pengambilan keputusan terjadi dalam lingkungan yang tidak pasti dan minim informasi. Kelima, ketika seorang pemimpin tidak berpengalaman dalam ranah kebijakan luar negeri. Keenam, pemimpin memiliki keahlian dalam suatu isu atau wilayah tertentu. Ketujuh, ketika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan *Hands-on* atau menugaskan seseorang untuk mengambil alih kursi pemegang keputusan. Terakhir, ketika adanya dinamika kelompok tertentu (Hudson & Day, 2020).

Dinamika kelompok juga berdampak pada keputusan akhir suatu kebijakan yang diputuskan berdasarkan proses negosiasi internal negara, adanya konflik kepentingan para pembuat keputusan, dan koalisi. Sedangkan konteks sosial-budaya berpengaruh pada persepsi atas ancaman dan peluang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan mikro melihat bahwa kebijakan luar negeri ialah cerminan atas interaksi antaraktor dengan konteks sosial-politik.

Sementara itu, yang disebut sebagai pendekatan makro membahas mengenai keterhubungan atribut nasional yang mampu memengaruhi arah dari kebijakan luar negeri yang akan diambil. Atribut nasional sebagai berikut (Hudson & Day, 2020):

1. Ukuran Negara

Negara berwilayah luas biasanya memiliki kepentingan strategis dan sumber daya alam yang beragam, sehingga kebijakan luar negerinya lebih kompleks, mencakup perlindungan perbatasan, eksploitasi sumber daya, dan pengaruh geopolitik. Sebaliknya, negara kecil cenderung fokus pada isu keamanan dan ekonomi yang spesifik.

2. Sumber Daya Alam

Ketersediaan atau kekurangan sumber daya alam dapat mendorong negara untuk mencari aliansi atau konflik dengan negara lain.

3. Geografi

Geografi berhubungan erat dengan Sumber Daya Alam (SDA). Banyak konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh perebutan suatu kawasan oleh negara-negara yang dipengaruhi dari SDA yang terdapat di wilayah geografis tersebut sehingga menjadi faktor penentu kebijakan luar negeri yang diambil.

4. Demografi

Kebijakan luar negeri dapat mencerminkan kepentingan populasi yang beragam dan disebabkan oleh aspek-aspek demografi yang mampu memengaruhi prioritas kebijakan luar negeri.

5. Sistem Politik

Sistem politik membentuk konteks kebijakan luar negeri yang dirumuskan, memengaruhi prioritas, tujuan, dan strategi yang diadopsi oleh suatu negara.

Sistem politik mencakup struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan ideologi yang dianut oleh negara tersebut.

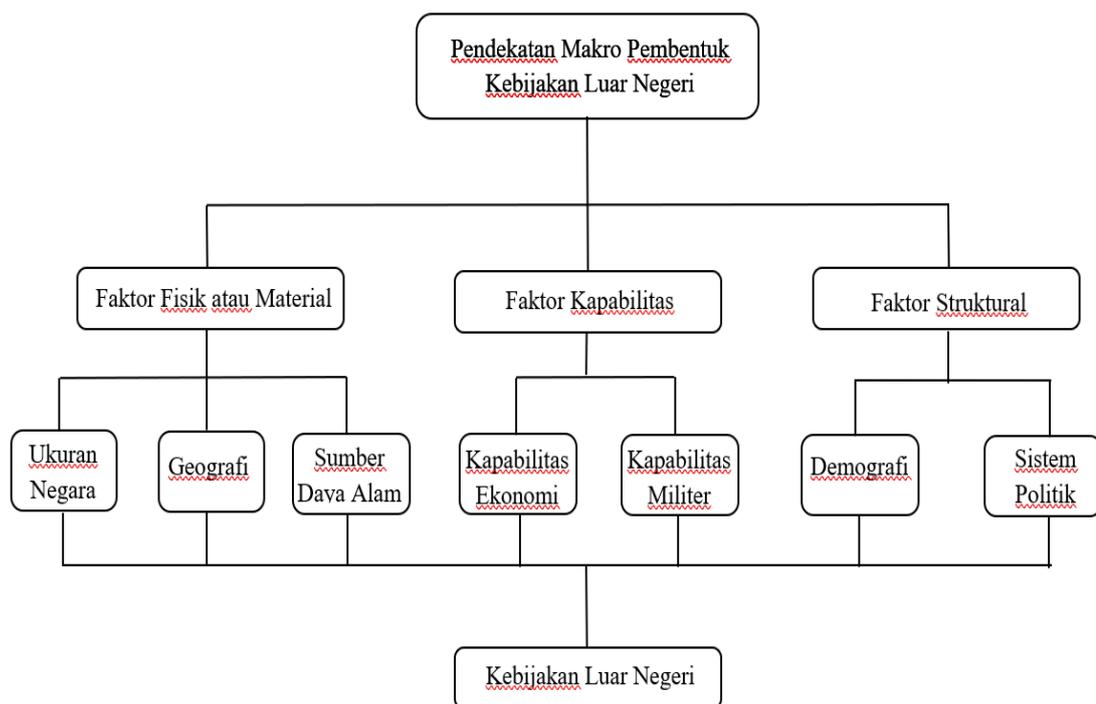
6. Kapabilitas Ekonomi

Kapabilitas ekonomi mencakup kekuatan ekonomi, perkembangan industri, dan akses sumber daya alam. Kapabilitas ini tidak hanya berupa kemampuan material, tetapi juga mencakup pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mencapai kebijakan luar negeri. Kapabilitas ekonomi juga berhubungan dengan keadaan ekonomi domestik suatu negara.

7. Kapabilitas Militer

Kapabilitas militer berperan besar dalam penentu keefektifitasan kebijakan luar negeri suatu negara seperti melalui proyeksi kekuatan, pencegahan, diplomasi militer, atau peran aktif dalam organisasi internasional.

Berikut ialah skema pendekatan makro yang mencakup ketujuh atribut nasional sebagai pembentuk kebijakan luar negeri suatu negara:



Gambar 2. 2 Skema Atribut Nasional
Sumber: diolah oleh Penulis

2.2.2. Konsep Hedging Strategy

Hedging strategy merupakan konsep terkait pendekatan kebijakan luar negeri mengenai pengelolaan kepentingan nasional. Inti dari strategi ini ialah bagaimana negara berperilaku kompetitif dan kooperatif di waktu yang bersamaan. Menurut Stiles, *hedging strategy* digunakan oleh negara dan aktor di dalamnya untuk membatasi komitmen mereka terhadap suatu perjanjian sekaligus melindungi negara dari resiko melalui diversifikasi komitmen (Stiles, 2018). Diversifikasi komitmen dalam konteks *hedging strategy* mengacu pada upaya negara dengan menyebarkan komitmen dalam bentuk kerja sama, perjanjian, pembahasan mengenai suatu isu, dan bentuk komitmen lainnya. Tujuan dari *hedging strategy* ialah untuk mengelola kepentingan nasional yang beragam di tengah ketidakpastian mengenai distribusi kekuasaan (Pujol, 2024). *Hedging strategy* juga dikatakan sebagai strategi yang mempersiapkan untuk skenario terbaik dan skenario terburuk (Chwee, 2016; Wang, 2021). Gonzalez-Pujol mengemukakan bahwa *hedging strategy* dianggap sebagai strategi yang menggabungkan instrumen dari strategi-strategi lain seperti *balancing* dan *bandwagoning* tanpa berpihak pada sisi manapun. Dengan demikian, *hedging strategy* terletak di titik tengah antara kepercayaan dan ketidakpercayaan yang mengizinkan negara untuk terlibat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan tanpa menaruh kepercayaan sepenuhnya.

Strategi *hedging* mendorong negara untuk bertindak lebih leluasa atau fleksibel dalam interaksi antarnegara, khususnya dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam strategi ini, negara dapat mengkombinasikan keterlibatan secara ekonomi dan politik dengan kekuatan besar yang mengancam sambil secara bersamaan menjaga hubungan keamanan, pun sebaliknya (Lim & Cooper, 2015). *Hedging strategy* menjelaskan bahwasanya negara mengadopsi strategi ini untuk membantu dalam menemukan keseimbangan yang memuaskan antara kepentingan-kepentingannya yang harus dipenuhi. Kepentingan nasional dapat dicapai melalui kebijakan luar negeri. Kuik menyatakan bahwa melalui pendekatan *hedging strategy*, adanya kemungkinan dampak yang kontradiktif atau saling bertentangan dalam upaya menyeimbangkan antara keuntungan maksimal dan potensi risiko yang akan didapatkan dari pengimplementasian kebijakan luar

negeri suatu negara (Kuik, 2008). Kontradiksi muncul sebagai akibat dari penerapan *hedging strategy* yang menitikberatkan pada inkohereni dan kontradiksi perilaku kooperatif dan kompetitif suatu negara (Pujol, 2024). Dalam implementasi strategi *hedging*, suatu negara dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan atau kontradiktif (Lim & Cooper, 2015). Contohnya, perilaku kompetitif suatu negara seperti persaingan kemampuan militer dan pendorongan kerja sama ekonomi sebagai perilaku kooperatif.

Dalam strategi *hedging*, aspek kooperatif atau yang disebut sebagai *return-maximizing* dapat berbentuk pendorongan kerja sama ekonomi atau *economic-pragmatism*. Pada dasarnya, *economic-pragmatism* dapat diartikan sebagai pendekatan kebijakan yang mengutamakan aspek pragmatisme dalam hubungan ekonomi tanpa terikat pada pertimbangan ideologi atau politik dengan tujuan memaksimalkan keuntungan ekonomi nasional. Menurut Kuik Cheng-Chwee, dalam “*How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states’ alignment behavior towards China*”, *economic-pragmatism* sebagai komponen strategi *hedging* terdiferensiasi dari pendekatan ekonomi biasa (Kuik, 2016). Pertama, *economic-pragmatism* menekankan pada pengembangan hubungan ekonomi yang bersifat pragmatis dengan berbagai pihak, termasuk negara yang kemungkinan memiliki ketegangan politik, perbedaan ideologi, dan sengketa teritorial. Kedua, *economic-pragmatism* tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, namun juga mengutamakan pembangunan interdependensi ekonomi jangka panjang sebagai upaya mitigasi potensi konflik (Chwee, 2016).

Kuik Cheng-Chwee mengidentifikasi beberapa indikator utama dari karyakaryanya dalam menganalisis implementasi *economic-pragmatism* sebagai komponen strategi *hedging*. Pertama, peningkatan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral. Kedua, pengembangan infrastruktur dan konektivitas lintas batas yang bukan hanya dimanfaatkan sebagai fasilitas perdagangan dan investasi, namun juga guna menciptakan interdependensi yang dapat memperkuat hubungan ekonomi antarnegara. Ketiga, fasilitas investasi dan perdagangan (Kuik, 2008; Kuik, 2016).

Sama halnya dengan strategi lain, pada dasarnya strategi *hedging* memiliki peluang dan risiko yang perlu diperhitungkan oleh negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Strategi *hedging* memberikan mekanisme berupa perilaku

kooperatif dan kompetitif yang dapat diterapkan oleh suatu negara. Mekanisme yang diberikan strategi *hedging* ialah negara mampu menghindari dampak negatif dari ketidakpastian sistem. Di sisi lain, risiko muncul dari kontradiksi antara perilaku kooperatif dan kompetitif yang berlawanan. Oleh karena itu, strategi *hedging* mampu menciptakan konflik dan kekhawatiran terkait keamanan dari aktor terlibat yang secara kurang tepat menafsirkan *hedging* sebagai suatu strategi (Pujol, 2024).

2.3. Assertiveness

Asertivitas merupakan istilah dalam disiplin ilmu komunikasi dan psikologi yang dalam perkembangannya sering digunakan untuk mendeskripsikan perilaku suatu negara dalam Hubungan Internasional. Istilah ini sering digunakan dan mulai populer pada tahun 1970an (Spiegeleire, Chivot dkk., 2014) Perilaku asertif terletak di antara dua perilaku; pasif dan agresif. Asertif dapat diartikan sebagai perilaku yang menghargai hak atas diri sendiri dan hak orang lain.



Gambar 2. 3 Perbedaan antara perilaku pasif, asertif, dan agresif
Sumber: The Hague Centre for Strategic Studies

Dalam Hubungan Internasional, asertivitas merujuk pada sikap atau pendekatan secara tegas, jelas, dan percaya diri yang ditempuh oleh suatu negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di ranah global. Meskipun asertif merupakan perilaku netral, namun dalam penggunaannya sering diasosiasikan dengan pengertian negatif. Istilah asertif dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional sebagai bentuk diplomasi asertif yang secara eksplisit mengancam untuk memberlakukan konsekuensi terhadap aktor lain yang secara jelas lebih tinggi daripada sebelumnya (Johnston, 2013). Elemen istilah asertif atau asertivitas

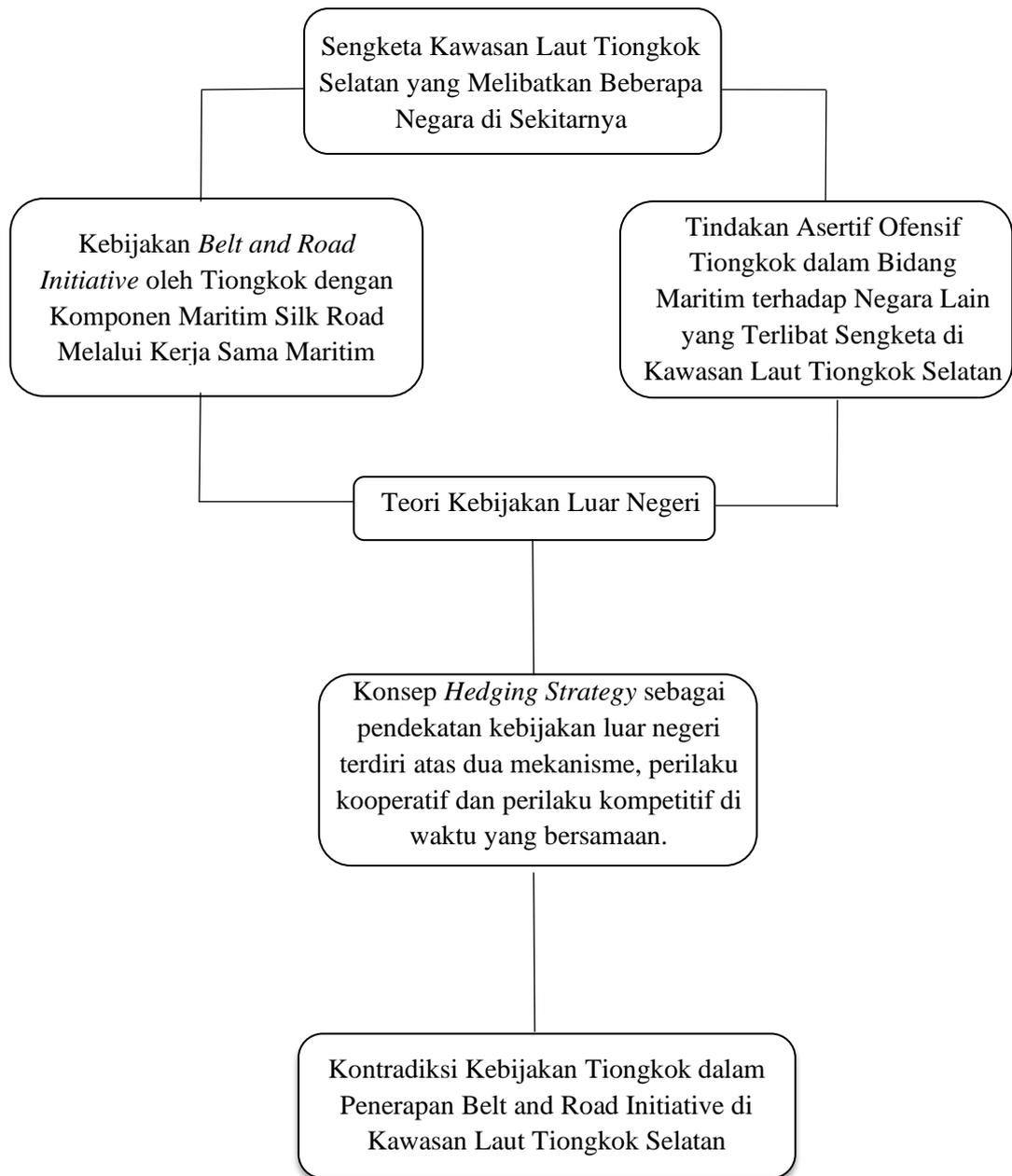
berkaitan dengan interaksi antarnegara dan adanya ancaman yang diiringi dengan eskalasi dari ancaman yang dimaksud.

Namun, dalam mendefinisikan perilaku asertif dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional diperlukan penekanan atas *power* atau kekuasaan dibandingkan dengan konsekuensi. Kekuasaan nasional yang dimiliki oleh suatu negara terdiferensiasi atas empat jenis. Pertama, kekuasaan yang diartikan sebagai kekuasaan intrinsik yang dimiliki oleh suatu negara. Kedua, kekuasaan yang dimiliki berdasarkan keinginan dan kemampuan negara tersebut dalam mewujudkannya melalui tindakan nyata atau secara faktual. Ketiga, kekuasaan yang diakui secara retorik melalui legitimasi aktor melalui kemampuan komunikasi dan persuasi. Keempat, kekuasaan yang dirasakan oleh negara lain (Spiegeleire, Chivot dkk., 2014). Dalam laporan The Hague Centre for Strategis Studies, ada dua jenis asertivitas yakni asertivitas objektif dan subjektif. Asertivitas objektif ialah perilaku asertif yang meningkat dalam setidaknya satu jenis kekuasaan. Sementara itu, asertivitas subjektif adalah perilaku asertif yang dinilai oleh aktor lain baik sesuai maupun tidak pada realitanya (Spiegeleire, Chivot dkk., 2014).

Berdasarkan konsep mengenai asertivitas dan perilaku asertif yang telah diuraikan, terlihat bahwa kekuasaan dan asertivitas saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari konteks strategis dan interaksi antarfaktor. Keempat jenis kekuasaan, yakni intrinsik, faktual, retorik, dan yang dirasakan oleh aktor lain, saling berinteraksi dalam membentuk kekuatan dan pengaruh dari suatu negara di panggung internasional. Sedangkan, perbedaan antara asertivitas subjektif dan objektif mendeskripsikan bahwa persepsi dan interpretasi bersifat krusial dalam menilai tindakan suatu negara. Dalam konteks tindakan negara, negara-negara sering mengkombinasikan keempat jenis kekuasaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Contohnya ialah ketika suatu negara yang memiliki kekuasaan intrinsik seperti kekuatan militer yang besar dapat menggunakan kekuasaan retoriknya dalam memengaruhi negara lain. Dengan demikian, asertivitas bukan hanya berdasarkan tindakan nyata, namun juga merupakan *output* dari konstruksi dan interpretasi strategis dalam hubungan internasional.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran untuk membantu membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini dan untuk menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan terkait kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* di kawasan Laut Tiongkok Selatan.



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh Penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan aspek metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas lima bagian, yaitu jenis penelitian yang dilakukan, fokus penelitian, sumber data yang akan dicantumkan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan informasi, dan metode analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis eksplanatif, dengan penelitian yang berfokus pada kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data rujukan yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode kondensasi data guna menarik kesimpulan yang sesuai. Dengan demikian, langkah-langkah ini dilakukan agar dapat memahami mengenai faktor-faktor yang menimbulkan adanya kontradiksi di antara kebijakan luar negeri Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis eksplanatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam menganalisis suatu signifikansi pada berbagai tingkatan termasuk individu, kelompok, atau masalah sosial (Creswell, 2014). Penggunaan metode kualitatif juga bertujuan untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau fenomena yang akan diteliti. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif eksplanatif ini ialah memberikan penjelasan terkait terjadinya suatu fenomena dengan disertai hubungan sebab dan akibatnya. Penulis akan melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena secara holistik dan deskriptif, serta menggunakan teknik

eksplanatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis yang dilakukan penulis terkait penelitian ini merujuk pada konsep dan teori terpilih yang kemudian diperkuat dengan data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian kualitatif ini melibatkan observasi terhadap dokumen, transkrip, serta penghubungan teori dan konsep yang relevan dengan fenomena kasus yang diteliti (Neuman, 2013).

Penelitian yang akan membahas mengenai kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan dianggap relevan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian ini akan memaparkan dan menggali lebih dalam mengenai kebijakan luar negeri yang diputuskan Tiongkok di kawasan sengketa dan berusaha menjelaskan proses sebab-akibat dari kebijakan-kebijakan Tiongkok yang terindikasi adanya kontradiksi dalam implementasi kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Menurut Creswell, terdapat beberapa langkah dalam melakukan suatu penelitian. Pertama, pemilihan masalah yang mengharuskan untuk mengidentifikasi masalah yang spesifik dengan disertai pertanyaan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kedua, mengumpulkan data dari sumber-sumber yang mampu membantu mengkonstruksi permasalahan yang dipilih. Selanjutnya, teori dan konsep yang dianggap relevan dipilih guna menganalisis permasalahan yang telah dikonstruksi yang kemudian dilakukan analisis permasalahan yang akan diinterpretasikan oleh penulis melalui suatu kesimpulan (Creswell, 2014). Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan mampu membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian secara lebih mendetail.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi sebuah penelitian agar tetap sesuai konteks yang dimaksud dalam penelitian. Dengan demikian, fokus penelitian diharapkan berguna bagi penulis untuk menganalisis objek penelitian. Penelitian ini berfokus untuk membahas kontradiksi antara kebijakan-kebijakan luar negeri Tiongkok. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana tindakan asertif yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara yang terlibat persengketaan wilayah

dalam bidang militer di kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu kebijakan luar negerinya, bagaimana faktor-faktor berinteraksi dan berpengaruh pada proses pemutusan suatu kebijakan luar negeri, serta bagaimana kemungkinan hal tersebut berimplikasi pada kebijakan luar negeri yang diambil oleh Tiongkok terkait pada *Belt and Road Initiative* (BRI) khususnya pada salah satu komponennya, *Maritime Silk Road* (MSR).

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka sebagai sumber data. Data sekunder yang dikategorikan sebagai sumber data terdiri atas bervariasinya sumber literatur tertulis yang sesuai dengan penelitian seperti artikel, jurnal, buku, laporan tahunan terkait topik yang menjadi fokus penelitian oleh Penulis termasuk dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), *International Institute for Strategic Studies* (IISS), dan RAND Europe. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan Tiongkok khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan, seperti artikel atau jurnal yang membahas mengenai *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Maritime Silk Road* (MSR). Data lainnya yang penulis gunakan ialah data yang bersumber dari laman atau portal berita daring yang terpercaya dalam memberikan informasi lawas maupun terkini mengenai topik terkait penelitian khususnya mengenai kawasan Laut Tiongkok Selatan, seperti BBC, CNN, South China Morning Post, Aljazeera, dan The Guardian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan guna mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan memahami dan mempelajari literatur dan dokumen yang berkaitan dengan kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan, kepentingan nasional Tiongkok, serta tindakan asertif Tiongkok yang dinilai ofensif

terhadap negara lain yang memiliki klaim atas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis akan menyortir dan mengkategorikan literatur dan dokumen sesuai dengan topik penelitian yang kemudian dirangkum dan diinterpretasikan melalui tulisan dari penelitian ini secara sistematis.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah di mana dilakukannya penguraian masalah dari suatu penelitian yang diharapkan membantu penulis untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari penelitian. Menurut Miles dan Huberman, langkah yang terdapat dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat repetitif dan berkesinambungan. Empat alur dalam teknik analisis data (Miles & Huberman, 2018):

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam melakukan analisis data di mana penulis mengumpulkan data secara keseluruhan tanpa dipilah terlebih dahulu. Penulis menghimpun data yang secara umum terlihat berkaitan dengan topik penelitian penulis. Data yang dikumpulkan terdiri atas berbagai sumber seperti laman dan dokumen resmi dari suatu negara seperti *State Council Information Office of China, the State Council The People's Republic of China*, lembaga-lembaga *thinktank*, laporan dari berbagai sumber terpercaya seperti IISS, RAND, CSIS, Reuters, Asian Maritime Transparency Initiative. Selain itu, penulis juga mengumpulkan literatur terkait yang bersumber dari artikel, jurnal, laman resmi, dan sumber daring lainnya.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini, penulis melakukan pemilihan dan penyederhanaan data yang ada dengan mengelompokkan data tersebut melalui cara yang lebih sistematis seperti berdasarkan tema maupun judul yang lebih spesifik. Penulis mereduksi data melalui studi pustaka terkait kebijakan luar negeri Tiongkok yang mencakup *Belt and Road Initiative* (BRI), kebijakan asertivitas militer,

kebijakan luar negeri, dan *hedging strategy*. Selain itu, penulis juga mereduksi data mengenai konfrontasi dan konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Reduksi data dilakukan oleh penulis dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menyenyaikan data mana saja yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis. Dengan demikian, penulisan penelitian akan memiliki fokus dan limitasi yang jelas.

3. Penyajian Data

Di tahap ini, penulis menyajikan data dengan berbagai cara untuk memuat data tersebut seperti penggunaan bagan, gambar, dan bisa pula berupa teks naratif. Penyajian data dapat membantu penulis untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan direduksi. Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi ialah data yang telah dikutip oleh penulis pada tahapan reduksi data. Selain itu, penyajian data baik berbentuk tabel maupun grafik ditujukan untuk memberikan visualisasi data yang ditemukan yang kemudian diolah oleh penulis yang dianggap mampu menunjang penulisan penelitian. Pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik dalam penelitian ini berkenaan dengan PDB Tiongkok dalam kurun waktu 25 tahun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mencakup PDB/GDP, anggaran militer, dan cadangan devisa Tiongkok, dan pertumbuhan populasi Tiongkok.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah sampai di tahap ini, penulis akan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari data-data yang telah dikumpulkan dan direduksi untuk mendukung penulisan dari suatu penelitian. Penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk membantu penulis menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dengan bantuan teori kebijakan luar negeri dan konsep *hedging strategy* sebagai kerangka analisis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis juga mengaplikasikan konsep *hedging strategy* untuk membantu memberikan pemahaman fenomena terkait Laut Tiongkok Selatan dengan menghubungkan data empiris baik dengan teori maupun konsep. Penulis merumuskan kesimpulan awal berlandaskan pada analisis yang telah dilakukan. Kemudian, dalam menarik kesimpulan harus diverifikasi agar kesimpulan tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses verifikasi yang penulis lakukan melibatkan pemeriksaan ulang terhadap kesesuaian antara data, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, penulis juga melakukan *crosscheck* dengan sumber-sumber akademis lain untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

V. KESIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

Tiongkok menjatuhkan klaim historisnya yakni sembilan garis putus atau *Nine-dash line* atas dasar keyakinan bahwa kepemilikan kawasan Laut Tiongkok Selatan sebesar 90 persen dari total keseluruhannya ialah milik Tiongkok. Asertivitas maritim yang dilakukan Tiongkok sejak beberapa dekade lalu membuktikan bahwasanya Tiongkok memiliki suatu kepentingan strategis yang harus dilindungi dan diamankan. Namun, sejak diumumkannya kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2013, yang justru penerapannya di Laut Tiongkok Selatan dalam komponen *Maritime Silk Road* (MSR) bertentangan dengan asertivitas maritimnya. Hal ini memperlihatkan bahwasanya adanya kontradiksi dalam kebijakan Tiongkok yang diimplementasikan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Kontradiksi kebijakan luar negeri Tiongkok terlihat jelas dalam penerapan strategi gandanya di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Di satu sisi, Tiongkok menunjukkan aspek kooperatif melalui *Belt and Road Initiative* sebagai instrumen ekonomi yang menawarkan kerja sama dan pembangunan infrastruktur kepada negara-negara ASEAN. Namun di sisi lain, Tiongkok juga menampilkan aspek kompetitif melalui asertivitas maritimnya yang ditunjukkan dengan klaim *Nine-dash line* dan militarisasi kawasan. Kontradiksi ini muncul sebagai manifestasi dari upaya Tiongkok untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya melalui dua pendekatan yang berbeda. Kontradiksi hadir sebagai dampak penerapan strategi *hedging* Tiongkok yang diterapkan melalui dua kebijakannya yang secara bersamaan berkenaan dengan Laut Tiongkok Selatan. Dengan aspek kooperatif melalui BRI, Tiongkok berusaha membangun pengaruh ekonomi dan menciptakan ketergantungan negara-negara kawasan. Sementara itu, Tiongkok melalui asertivitas maritimnya berupaya untuk mengamankan kepentingan

teritorial dan strategisnya di Laut Tiongkok Selatan. Kedua kebijakan ini, meskipun tampak bertentangan, sebenarnya merepresentasikan penggunaan atribut nasional Tiongkok - baik ekonomi maupun militer - untuk mencapai tujuan yang sama yaitu dominasi regional.

Dalam implementasinya, kontradiksi ini menciptakan dilema bagi negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Di satu pihak, mereka tertarik dengan manfaat ekonomi yang ditawarkan melalui BRI, namun di pihak lain mereka menghadapi tekanan dari asertivitas maritim Tiongkok yang mengancam kedaulatan mereka. Situasi ini mencerminkan kompleksitas strategi Tiongkok dalam mengejar kepentingan nasionalnya, di mana penggunaan instrumen ekonomi dan militer secara bersamaan menciptakan dinamika hubungan yang kompleks di kawasan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat saran untuk para peneliti lainnya yang dapat dijadikan sebagai topik atau pemahasan untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih lanjut terkait bagaimana keberlanjutan implementasi strategi *hedging* Tiongkok dalam kebijakan BRI dan asertivitasnya di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian tersebut diperluka untuk melihat bagaimana keberhasilan dan keefektivitasan strategi *hedging* yang digunakan oleh Tiongkok untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Asia Maritime Transparency Initiative. (2018). *Island Tracker: China's Outpost Expansion*. Center for Strategic and International Studies.
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2024). *China Island Tracker*. From Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/island-tracker/china/#Other%20Features>.
- Asia Maritime Transparency Initiative . (2024). *Shifting Tactics at Second Thomas Shoal*. From Asia Maritime Transparency Initiative : <https://amti.csis.org/shifting-tactics-at-second-thomas-shoal/>
- Asian Development Bank. (2018). Meeting Asia's Infrastructure Needs: BRI and Beyond. Special Report.
- Asian Development Bank. (2024). *Asian Development Outlook April 2024*. Asian Development Bank.
- Constitution of the Communist Party of China. (2017). *Amended and adopted at the 19th National Congress of the Communist Party of China*.
- Abe, K. (2024). Brunei in ASEAN: How Brunei maintains its Relationship with China. *國際政經論集*.
- AidData. (2024). *Beijing's Big Bet on the Philippines*.
- Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping.
- Alenezi, D. A. (2024). US rebalance strategy to Asia and US-China rivalry in South China Sea from the perspective of the offensive realism. *Review of Economics and Political Science*, 9(2), 102-115.
- AlMannai, M. F. (2019). Why China Built in the South China Sea.
- Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping.
- Barman, J. (2023). China's Belt and Road Initiative: An Analysis. *Journal of Contemporary Politics*.
- Berkofsky, A., & Sciorati, G. (2022). *China's Foreign Policies Today: Who is in Charge of What*. Milan: Ledizioni LediPublishing.

- Blackwill, R. D., & Campbell, K. M. (2016). *Xi Jinping on the Global Stage: Chinese Foreign Policy Under a Powerful but Exposed*. New York: Council on Foreign Relations Special Report.
- Blanchard, J.-M. F., & Flint, C. (2017). The Geopolitics of China's Maritime Silk Road Initiative. *Geopolitics*, 223-245.
- Callahan, W. A. (2016). China's Belt and Road Initiative and the New Eurasian Order. *Norwegian Institute for International Affairs*.
- CEIC. (2024). *Tionggok Populasi*. From CEIC: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/china/population>
- Center for Strategic and International Studies (CSIS), Cordesman, A. H., Burke, A. A., & Molot, M. (2019). Military Build Up in South China Sea as Part of Overall Change in China's Strategic Posture.
- CHEN, C., & YAO, L. (2017). Belt and Road Initiative and Possible Impacts on the South China Sea Issue. *International Relations and Diplomacy*, 5(12), 709-716. 10.17265/2328-2134/2017.12.002.
- Chubb, A. (2021). Continuity and Change: China's Assertiveness in the South China Sea. <https://www.e-ir.info/2021/01/27/continuity-and-change-chinas-assertiveness-in-the-south-china-sea/>.
- Collins, G., & Grubb, M. C. (2008). *A Comprehensive Survey of China's Dynamic Shipbuilding Industry*. Newport, Rhode Island: Center for Naval Warfare Studies.
- Cordesman, A. H., Burke, A. A., & Molot, M. (2019). Military Build Up in South China Sea as Part of Overall Change in China's Strategic Posture.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- De Castro, R. C. (2019). China's Belt and Road Initiative (BRI) and the Duterte Administration's Appeasement Policy: Examining the Connection Between the Two National Strategies. *East Asia*.
- DeWoskin, K. J., & Suzuki, C. (2024, Nov 23). *China*. From Britannica: <https://www.britannica.com/place/China>
- Djankov, S. (2016). *THE RATIONALE BEHIND CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE*. Peterson Institute for International Economics.
- Dolven, B., Elsea, J. K., Lawrence, S. V., O'Rourke, R., & Rinehart, I. E. (2015). *Chinese Land Reclamation in the South China: Implications and Policy Options*. Congressional Research Service.

- Donavan, D. (2013). *Contradiction in Chinese Foreign Policy*.
- Fangyin, Z. (2016). Between Assertiveness and Self-restraint: Understanding China's South China Sea Policy. *International Affairs*, 869-890.
- Frankel, J. (1970). *National Interest*. Palgrave Macmillan UK.
- Goh, E. (2016). Understanding Hedging in Asia-Pacific Security. *Pacific Review*.
- Grassi, S. (2020). *The Belt and Road Initiative in Malaysia: China's Geopolitics and Geoeconomics Challenged by Democratic Transformation*. Friedrichebert Stiftung.
- Grewal, B. S., & Ahmed, A. H. (2011). Is China's Western Region Development Strategy on Track? An assessment. *Journal of Contemporary China*.
- Grossman, D. (2019). *Military Build-up in the South China Sea*. RAND Corporation.
- Ha, L. T. (2019). *Chinese Investment in Vietnam: Trends, Status and Challenges*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Hameed, D. A., & AL.Mufarge, H. R. (2022). Contemporary Global Security Strategies And The Manifestations Of Major Powers: Hedging Strategy As A Model. *Journal of Positive School Psychology*, 4339-349.
- Hanifudin, A. F., Priyanto, Suhirwan, & Sutanto, R. (2023). China Maritime Militia dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia . *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 420-433.
- He, K. (2016). *China's Crisis Behavior*. Cambridge University Press.
- Heydarian, R. (2020). *The Rise of Duterte: A Populist Revolt against Elite Democracy*. Palgrave Macmillan.
- Heriawan. (2022). The Ever-growing China's Maritime Rise and South China Sea Dispute: A Literature Review. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1).
- Hiep, L. (2018). The Belt and Road Initiative in Vietnam: Challenges and Prospects. *ISEAS Yusof Ishak Institute* .
- Hlongwa, L. (2020). China's Maritime Silk Road Initiative: A quest for . *South African Journal of Military Studies*.
- Holbig, H. (2002). The Emergence of the Campaign to Open Up the West: Ideological Formation, Central Decision-making and the Role of the Provinces. *The China Quarterly*.

- Hongbin, D., & Ullah, I. (2022). THE SOUTH CHINA SEA'S NINE-DASH LINE: KEY DISPUTES AND CHINA'S HISTORICAL RIGHTS CLAIMS. *JOURNAL OF PAKISTAN-CHINA STUDIES (JPCS)*.
- Hong Kong Productivity Council. (2024). *Overview of Brunei*. From Hong Kong Productivity Council: https://www.hkpc.org/images/stories/2019/corp_info/hkpc_pub/asean_guide/brunei_guide.pdf.
- Hoon, C.-Y., & Zhao, K. (2024). Emerging Chinese Foreign Direct Investment in Brunei. *East Asian Policy*.
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2019). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Hui-yi. (2016). Re-contemplating the South China Sea Issue: Sailing with the Wind of the 21st Century Maritime Silk Road. *The Chinese Journal of Global Governance* 2, 63-95.
- International Energy Agency. (2020). *World Energy Outlook 2020: China Special Report*.
- Ilik, G., & Shapkoski, V. (2022). The Belt and Road Initiative and the South China Sea conflict Chinese ambitions in the new era. *FAULTLINES The K.P.S. Gill Journal of Conflict & Resolution*, 41-57.
- IISS. (2015). China's ambitious Silk Road vision. *Strategic Comments*, 21(6), IV-V. International Institute for Strategic Studies. <https://www.iiss.org/en/publications/strategic-comments/2015/silk-road/>.
- IISS. (2019). *Military Balance*.
- Jakobson, L., & Manuel, R. (2016). How are Foreign Policy Decisions Made in China? *Asia & the Pacific Policy Studies*, 101-110. <https://doi.org/10.1002/app5.121>.
- Japan Ministry of Defense. (2024). *China's Activities in the South China Sea (China's Development Activities on the Features and Trends in Related Countries)*. Japan Ministry of Defense.
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (1979). *Recent Chinese Activities in the East China Sea: Historical Review 1970-1980*. Japan Ministry of Foreign Affairs.
- Johnson, C. K. (2016). *President Xi Jinping's "Belt and Road" Initiative*. Center for Strategic and International Studies.
- Johnston, A. I. (2013). How New and Assertive Is China's New Assertiveness. *International Security*, 7-48.

- Jones, L., & Zeng, J. (2019). Understanding China's 'Belt and Road Initiative': beyond 'grand strategy' to a state transformation analysis. *Third World Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1559046>.
- Joshi, Prashant, & dkk. (2021). Interpretative Conflicts in the South China Sea Dispute: Analyzing UNCLOS Implementation Challenges. *Asian Journal of International Law*.
- Kaplan, R. D. (2020). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- Kartini, I. (2015). Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2).
- Korkut, E., & Kang, W. H. (2017). CHINA'S NINE DASH LINE CLAIM IN LIGHT OF THE RULING BY THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION (12 JULY 2016). *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 5(2).
- Kuik, C.-C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia A Journal of International and Strategic Affairs*.
- Kuik, C.-C. (2017). Explaining the Contradiction in China's South China Sea Policy: Structural Drivers and Domestic Imperatives. *China: An International Journal*, 15(1), 163-186.
- Kuok, L. (2019, November). How China's Actions in the South China Sea Undermine the Rule of Law. *Global China*.
- Kusuma, W., Kurnia, A. C., & Agustian, R. A. (2021). SOUTH CHINA SEA: CONFLICT, CHALLENGE, AND SOLUTION . *Lampung Journal of International Law* .
- Lai, H., & Kang, S. (2013). Domestic Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy. *Journal of Contemporary China*, 294-313.
- Lawrence, I. (2021). Brunei's Response to China's Belt and Road Initiative: Embracing Asymmetry, Enhancing Authority. *Asian Perspective*, 397-420.
- Lee, S. (2017). An Institutional Analysis of Xi Jinping's Centralization of Power. *Journal of Contemporary China*. <http://dx.doi.org/10.1080/10670564.2016.1245505>.
- Lim, D. J., & Cooper, Z. (2015). Reassessing Hedging: The Logic of Alignment in East Asia. *Security Studies*, 696-727.

- Lin, K. J., Lu, X., Zhang, J., & Zheng, Y. (2019). State-owned enterprises in China: A review of 40 years of Research and Practice. *China Journal of Accounting Research*, 31-55.
- Lingjie, K. (2015). The Belt and Road Initiative and China's Foreign Policy Toward Its Territorial and Boundary Disputes. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 325-345.
- Marriga, Maria N. U. (2024). The Philippines in China's BRI. Policy Brief Series. University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies.
- Melvin, M. G. (2013). *China's Military Modernization: An Analysis of The PLA Improved Logistic Capability*. Alabama, United States of America: Air War College.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Miner, S. (2016). *Economic and Political Implications*. Peterson Institute for International Economics.
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (2006). *Politics Among Nations* (K. W. Thompson & W. D. Clinton, Eds.). McGraw-Hill Education.
- Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61003-0>.
- Morris, L. J. (2019). *Gray Zone Challenges in the East and South China Sea*. RAND Corporation.
- National Bureau of Statistics of China. (2021). *China Statistical Yearbook 2021*. Beijing: China Statistics Press.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- Nouwens, M. (2023). *CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE A DECADE ON*. International Institute for Strategic Studies.
- Official Portal Ministry of Foreign Affairs Malaysia. (2024, September). *Leak of Classified Information Related to A Diplomatic Note*. From LEAK OF CLASSIFIED INFORMATION RELATED TO A DIPLOMATIC NOTE: <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/leak-of-classified-information-related-to-a-diplomatic-note#:~:text=Malaysia's%20stance%20on%20the%20South,on%20the%201979%20Malaysia%20Map>.

- O'Neill, D. C. (2018). *Dividing ASEAN and Conquering the South China Sea: China's Financial Power Projection*. Hong Kong University Press.
- Parameswaran, P. (2015, November 03). *How Is Malaysia Responding to China's South China Sea Intrusion? From The Diplomat*: <https://thediplomat.com/2015/11/how-is-malaysia-responding-to-chinas-south-china-sea-intrusion/>
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*.
- Pixelsmerch. (2018). *China 3D Render Topographic Map Color*. From Pixelsmerch: <https://pixelsmerch.com/featured/china-3d-render-topographic-map-color-frank-ramspott.html>.
- Poling, G. B. (2019). *The South China Sea in Strategic Terms*. Center for Strategic and International Studies.
- Prime Minister's Office of Malaysia. (2024). *Malaysia's National Defence Policy*. From Prime Minister's Office of Malaysia: <https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2019/07/National-Defence-Policy.pdf>
- Pujol, I. G. (2024). Theorising the Hedging Strategy: National Interests, Objectives, and Mixed Foreign . *Center for East Asian Studies, Universidad Autonoma de Madrid*.
- Rabeya, S. (2023). The Belt and Road Initiatives (BRIs): Understanding China's Intentions Behind It. *European Journal of Law and Political Science*, 2(6). <http://dx.doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.100>.
- Rabena, A. J. (2018). The Complex Interdependence of China's Belt and Road Initiative in the Philippines. *Asia & the Pacific Policy Studies*.
- Rashid, S., Ikram, M., & Naeem, M. W. (2023). China's Foreign Policy Shift in South Asia vis-à-vis Belt and Road Initiative . *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY: APPLIED BUSINESS AND EDUCATION RESEARCH*, 1334-1349.
- Reuters. (2020, July 14). *Chinese ships intruded into Malaysian waters 89 times in four years - report*. From Reuters: <https://www.reuters.com/article/world/chinese-ships-intruded-into-malaysian-waters-89-times-in-four-years-report-idUSKCN24F1D8/>
- Reuters. (2024). *China-Philippines Maritime Incident Heightens South China Sea Tensions*. Reuters Asia Maritime Report.

- Rolland, Nadège. (2017). *China's "Belt and Road Initiative": Underwhelming or Game-Changer?*. The Washington Quarterly, 127-142. <http://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2017.1302743>.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Sen, T. (2023). Inventing the 'Maritime Silk Road'. *Modern Asian Studies*, 1059-1104. doi:10.1017/S0026749X22000348.
- Shang, H. (2019). What Is the Belt and Road Initiative? https://doi.org/10.1007/978-981-13-9201-6_1.
- Sianipar, Imelda M. J. (2024). China-the Philippines Relations in the Belt and Road Initiative Cooperation Framework, 68-84. <https://doi.org/10.15804/rop2023105>.
- SIPRI Military Expenditure Database. (2020). Trends in World Military Expenditure. *Stockholm International Peace Research Institute*.
- Smith, J. M. (2018). *China's Belt and Road Initiative: Strategic Implications and International Opposition*. The Heritage Foundation.
- Song, A. Y., & Fabinyi, M. (2022). China's 21st century maritime silk road: Challenges and opportunities to coastal livelihoods in ASEAN countries. *Marine Policy*.
- Spiegeleire, S. D., Chivot, E., Silveira, J., & Yang, M. Y. (2014). *Assessing Assertions of Assertiveness: The Chinese and Russian Cases*. The Hague Centre for Strategic Studies.
- State Council Information Office of China. (2017). *China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation*. White Paper.
- State Council Information Office of China. (2023). Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects. White Paper.
- Stiles, K. W. (2018). *Trust and Hedging in International Relations*. University of Michigan Press.
- Storey, I. (2020). *Malaysia and the South China Sea Dispute: Policy Continuity amid Domestic Political Change*. Singapore: ISEAS- Yusof Ishal Institute.
- Teixeira, V. A. (2021). The Hegemony's Contest in the South China Sea. *Sage Open*.
- Tessman, B., Wolfe, & Wojtek. (2011). Great Powers and Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy. *International Studies Association*, 214-240.

- Thayer, C. A. (2011). China's New Wave of Aggressive Assertiveness in the South China Sea. *Conference on Maritime Security in the South China Sea, sponsored by the Center for Strategic and International Studies*. Washington D.C.
- Thayer, C. A. (2016). Vietnam's Strategy of 'Cooperation and Struggle' with China over Maritime Disputes in the South China Sea. *Journal of Asian Security*, 1-21.
- Thayer, C. A. (2023). The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea. *Security Challenges Journal*.
- The State Council The People's Republic of China. (2016). *New five-year plan brings hope to China's west*. From English.gov.cn: https://english.www.gov.cn/premier/news/2016/12/27/content_281475526349906.htm.
- The World Bank. (2014). *Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Washington DC.: World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0222-5>.
- The World Bank (2019). *Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors*. World Bank Group.
- The World Bank. (2021). *World Development Indicators: Fertility Rates in East Asia and Pacific*. Washington D.C.: World Bank Group.
- Trung, N. T., & Vu, T.-M. (2018). The 2014 Oil Rig Crisis and its Implications for Vietnam–China Relations. *Vietnam's Foreign Policy under Doi Moi*, 72-95.
- United Nations. (2009). *Note Verbale CML/17/2009 from the Permanent Mission of the People's Republic of China to the UN Secretary-General*. UN Document Repository.
- United States Department of Commerce. (2020). *Commerce Department Adds 24 Chinese Companies to the Entity List for Helping Build Military Islands in the South China Sea*. From Global Public Affairs: U.S. Department of State: <https://2017-2021-translations.state.gov/2020/08/26/commerce-department-adds-24-chinese-companies-to-the-entity-list-for-helping-build-military-islands-in-the-south-china-sea/>.
- U.S.-China Economic and Security Review Commission. (2024). *Chapter 3 China and the World*. From U.S.-China Economic and Security Review Commission: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%203%20China%20and%20the%20World_1.pdf

- United States Department of State . (2014). *Limits in the Seas (China: Maritime Claims in the South China Sea)*. United States Department of State, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs.
- Vu, T. (2020). Vietnam's Cautious Embrace of the Belt and Road Initiative. *East Asian Policy*, 66-77.
- Wang, Zheng. (2015). Chinese Discourse on the "Nine-Dashed Line" Rights, Interests, and Nationalism. *Asian Survey*, 502-524. <https://doi.org/10.1525/as.2015.55.3.502>.
- Wang, Yong. (2016). Offensive for Defensive: the Belt and Road Initiative and China's New Grand Strategy. *The Pacific Review*, 455-463. <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1154690>
- Yamaguchi, Shinji. (2016). Strategies of China's Maritime Actors in the South China Sea: A Coordinated Plan under the Leadership of Xi Jinping?. *China Perspectives*, 23-31. 10.4000/chinaperspectives.7022.
- Yangwen, Z. (2019). *China's Maritime History and South China Sea Claims*. World Scientific Publishing Company.
- Yidaiyilu. (2015). *Vision And Actions On Jointly Building Silk Road Economic Belt And 21st-Century Maritime Silk Road*. From Eng.Yidaiyilu.gov.cn: <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/1084.html>
- Yoshihara, T., & Holmes, J. R. (2018). "Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy. *Naval Institute Press*.
- Yu, H. (2016). Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank. *Journal of Contemporary China*.
- Yuzhu, W. (2022). Hedging Strategy: Concept, Behavior, and Implications for China-ASEAN Relations. *East Asian Affairs*.
- Zeng, J., & Lancaster University. (2019). Narrating China's belt and road initiative. *Global Policy*.
- Zhang. (2018). The Concept of 'Community of Common Destiny' in China's Diplomacy: Meaning, Motives and Implications. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 196-207. 10.1002/app5.231.
- Zhao, Minghao. (2015). China's New Silk Road Initiative. *Istituto Affari Internazionali*. 103.230.48.131.
- Zhenmin, L. (2016). China's Historical Rights in the South China Sea. *Chinese Journal of International Law*.

Zhiguo Gao, Bing Bing Jia. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *The American Journal of International Law*.